



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 220/26112008
HARI : RABU
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Presiden India Kunjungi Indonesia	3
	Yudhoyono Undang Obama	3
	Thailand Siap Gelar KTT ASEAN	3
	Ledakan Terjadi di Bandara Bangkok dan Beberapa Lokasi	4
	Obama Sambut Gembira Hubungan RI-AS	4
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	RI must not ban book on Malik-CIA relations too soon	5
	KPU Mengubah Daftar Pemilih Tetap	5
	Kultur Politik Rabun Ayam Cederai Demokrasi	6
	Parpol Diminta Pakai Jaringan	7
	Habibie: Jangan Hambat Orang Jadi Pemimpin	8
	B. EKONOMI	
	Pemerintah Jaga Konsumsi Rumah Tangga	8
	RI bracing for mass layoffs	10
	Ekspor Batu Bara Harus Untungkan RI	11
	Pemerintah Siap Intervensi	11
	Indonesia tourism industry still waiting to rebound	13

	C.	SOSBUD	
		Kejar Keterbelakangan Lewat Save Papua	14
		29 ABK Hilang di Pasifik	14
		Hari Guru Nasional 2008 Guru Ancam Mogok Mengajar	15
	D.	HANKAM	
		Anggaran Pertahanan Terimbas Krisis Ekonomi	16
	E.	HUKUM	
		DPR Belum Pastikan Penyelesaian UU Tipikor	16
		Penyidik Ditarik, Perkara KPK Bisa Terganggu	17
		Bea Cukai Berhasil Cegah 297 Kasus Penyelundupan	18
	F.	OLAHRAGA: Tidak Ada	
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		RI climate follows the sun	19
	III.	ARTIKEL	
		Demi Guru Oleh Nadlifah Hafidz	20
		Solusi Kasus Adam Malik Oleh Asvi Warman Adam	22
	IV.	LAIN-LAIN	
		RI proven worthy of UN permanent seat: Envoy	24
	V.	EDITORIAL	
		Kemuliaan kepada Guru	25

Jakarta, 26 Nopember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Presiden India Kunjungi Indonesia

Presiden Republik India, Pratibha Devisingh Patil, akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 28 November hingga 3 Desember 2008.

Menurut keterangan resmi dari Departemen Luar Negeri di Jakarta, Selasa, kunjungan Presiden India tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama RI dengan India terutama di bidang politik, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Oleh karena itu, kedua kepala negara dijadwalkan menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) di bidang kerja sama pemuda dan olah raga, minyak dan gas, Pertanian, serta Program Pertukaran Pendidikan.

Turut menyertai kunjungan Presiden India adalah 20 orang delegasi resmi ditambah dengan wartawan dan staf pendukung lainnya. (Suara Karya)

2. Yudhoyono Undang Obama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan undangan kepada pemimpin baru Amerika Serikat, Barack Obama, untuk berkunjung ke Indonesia tahun depan. Kebetulan, Singapura akan menjadi tuan rumah pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) akhir tahun depan.

"Saat saya undang untuk datang ke Jakarta pada pertemuan APEC di Singapura tahun depan, beliau mengatakan datang ke Indonesia sangat penting. Selain untuk meningkatkan kerja sama, juga untuk menikmati bakso, rambutan, dan nasi goreng," kata Yudhoyono di bandar udara Nagoya, Jepang, kemarin, setelah berkunjung ke Benua Amerika.

Pembicaraan dengan Obama itu berlangsung sekitar enam menit ketika pesawat kepresidenan mengisi bahan bakar di Seattle, Amerika Serikat, Senin sore waktu setempat (Selasa pagi pukul 07.15 WIB), se usai kunjungan ke Peru dan hendak terbang ke Jakarta melalui Nagoya.

"Beliau menyapa saya dengan kata 'apa kabar, Bapak Presiden', dengan bahasa Indonesia yang masih fasih," kata Yudhoyono.

Presiden juga menyampaikan ucapan selamat kepada Obama atas terpilihnya dia sebagai pemimpin Amerika. Presiden dan Obama sepakat bahwa kedua negara berkepentingan meningkatkan hubungan baik. "Saya merasakan kehangatan dan suasana persahabatan dalam pembicaraan itu," kata Yudhoyono.

Dalam wawancara dengan pers AS saat masih berkampanye, sebelum masalah "madrasah Besuki" diributkan, Obama menyatakan akan mengunjungi Indonesia dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya. Obama sejak umur enam sampai 10 tahun menetap di Jakarta ketika ibunya menikah dengan pria asal Indonesia, Lolo Sutoro.

Ia bersekolah di SD Negeri Menteng 01 atau dikenal dengan nama SD Besuki. Pers Amerika sempat menduga SD itu sekolah Islam sehingga sejumlah media kemudian mengirim reporternya ke Jakarta.

Juru bicara Presiden, Dino Patti Djalal, mengatakan percakapan telepon itu telah dirancang sejak sebelum Yudhoyono meninggalkan Tanah Air pada 13 November lalu.

Yudhoyono meninggalkan Indonesia pada 13 November lalu untuk mengikuti pertemuan anggota G-20 di Washington, DC, Amerika Serikat, dan dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Meksiko dan Brasil, serta ke Peru untuk menghadiri pertemuan APEC ke-16. (Tempo Interaktif)

3. Thailand Siap Gelar KTT ASEAN

Thailand menyatakan siap menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi (KTT) negara-negara ASEAN pada Desember mendatang, meskipun aksi demonstrasi masih terus berlanjut dengan memblokir kegiatan parlemen, Selasa. Majelis tinggi dan majelis rendah parlemen telah bertemu untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan legislasi pelaksanaan KTT ASEAN yang akan diselenggarakan di kota Thailand utara, Chiang Mai. Namun meskipun telah mencapai kesepakatan mengenai perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani di dalam pertemuan, ketua parlemen menunda persidangan karena lebih dari 18.000 pelaku aksi protes mengepung parlemen dan menutup semua jalan masuk. (Suara Karya)

4. Ledakan Terjadi di Bandara Bangkok dan Beberapa Lokasi

Sebuah ledakan di bandara internasional Bangkok dan beberapa serangan granat di beberapa lokasi di kota itu mencederai setidaknya tujuh orang pada hari Rabu, saat pelanggaran hukum menyebar luas di tengah aksi protes antipemerintah.

Ledakan di Bandara Suvarnabhumi terjadi sehari setelah demonstran mengepung bandara, memaksa menutup dan menelantarkan ribuan penumpang.

"Paling sedikit dua orang terluka oleh ledakan bom di Suvarnabhumi pagi ini," kata Petpong Kamchornkitkarn, petugas layanan medis darurat, kepada AFP.

Dua stasiun televisi lokal mengatakan sebuah granat dilemparkan ke pengunjung rasa dan tiga orang terluka.

Sebuah serangan granat simultan terhadap para demonstran antipemerintah yang menguasai bandara Bangkok yang lama, Don Mueang, di mana perdana menteri berkantor sementara, telah melukai dua orang, kata Petpong.

Tiga orang lainnya terluka ketika dua granat yang dilemparkan ke pendukung pemerintah di jalan menuju Don Mueang, yang menjadi ajang bentrokan antara aktivis yang berlawanan dan menyebabkan 11 orang terluka hari Selasa, kata polisi.

Perdana Menteri Somchai Wongsawat dipindahkan ke lokasi di Don Mueang setelah demonstran menduduki kantor utama pemerintah di pusat Bangkok bulan Agustus.

Partai Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, yang melakukan protes, telah melakukan kampanye jalanan selama enam bulan terhadap pemerintah terpilih. (Tempo Interaktif)

5. Obama Sambut Gembira Hubungan RI-AS

Presiden Amerika Serikat terpilih Barack Obama menyatakan gembira atas kemajuan hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Barack Obama juga menyatakan kerinduannya datang ke Indonesia, antara lain untuk menikmati nasi goreng.

Hal tersebut dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers di Bandara Tacoma Seattle, Amerika Serikat, Senin waktu setempat atau Selasa WIB.

Presiden SBY melakukan perbincangan sekitar enam menit dengan Barrack Obama di Seattle saat transit dalam perjalanannya dari Lima, Peru menuju Jakarta.

"Saat saya undang untuk datang ke Jakarta saat APEC summit di Singapura tahun depan, beliau mengatakan datang ke Indonesia sangat penting. Selain untuk meningkatkan kerjasama, juga untuk menikmati bakso, rambutan dan nasi goreng," kata SBY.

Saat menceritakan percakapannya melalui telepon dengan Barack Obama, Presiden Yudhoyono juga mengatakan bahwa Obama masih fasih mengucapkan "apa kabar" dalam bahasa Indonesia.

Presiden AS terpilih Barack Obama sewaktu kecil pernah tinggal dan belajar di sebuah sekolah dasar di Jakarta.

Bahkan adik perempuan Obama, Maya Soetoro, separuhnya Indonesia tulen. Ketika Obama masih Senator dan berkantor di Gedung Senat di Sekitar Capitol Hill, diplomat Indonesia dan warga Indonesia di Washington DC kerap bertegur sapa.

Dalam percakapan tersebut, kedua Kepala Negara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan kedua negara dan saling mendukung peran kedua negara dalam forum-forum internasional.

Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal mengatakan percakapan telpon sebenarnya telah dirancang sejak sebelum Presiden Yudhoyono meninggalkan Tanah Air pada 13 November lalu.

Dalam percakapan itu, Presiden Yudhoyono juga menyampaikan selamat atas kemenangan Presiden Obama dalam pemilu beberapa waktu lalu dan menyatakan siap bekerja sama dengan Obama melanjutkan hubungan baik itu.

Menurut Dino, Presiden Obama juga menyatakan kebanggaannya bila bisa berkunjung ke Indonesia suatu saat nanti untuk mempererat hubungan Indonesia dan Amerika.

Dalam perjalanan pulang ke Tanah Air, Presiden Yudhoyono dijadwalkan kembali singgah di Bandara Nagoya Jepang sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta (Jurnal Nasional)

I I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. RI must not ban book on Malik-CIA relations too soon

The attorney general should not ban the book on Legacy of Ashes; The history of CIA, on the involvement of former foreign minister Adam Malik in the CIA (Central Intelligence Agency).

The book was written by Tim Weiner, a New York Journalist who won a Pulitzer Prize.

"I think the attorney general should not ban the book too soon, because now we can open and study the 25-35 years old US documents," the House Commission 1 member, Permadi SH of the Indonesian Democratic Struggle Party (PDIP) said here Tuesday.

"A hero sometimes cannot maintain his life pattern, like Bung Karno, who doesn't appreciate his struggle". But in the end he became involved in the PKI (Indonesian Communism Party), and Suharto where he was dragged down with his corruption cases," he said.

He also said that we do not have to say anything in a hurry, let the people judge, please read the book first for its objectivity, his family can always complain to the writer.

In today's democratic era, banning a book is no longer valid, Permadi said.

When questioned about Adam Malik's CIA involvement he said that we cannot say for sure that he was involved in the CIA, allow this matter to roll and we haven't learn the US documents yet. (Antara)

2. KPU Mengubah Daftar Pemilih Tetap

Bawaslu didesak menginvestigasi perubahan jumlah pemilih tetap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan dengan SK KPU No 383/2008 tanggal 24 Oktober 2004. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah LSM pemantau pemilu mengancam memperkarakan KPU.

Dalam DPT yang baru, KPU menyatakan jumlah pemilih adalah 171.068.667, terdiri atas 169.558.775 pemilih di dalam negeri dan 1.509.892 pemilih di luar negeri. DPT yang diumumkan Senin (24/11) tengah malam ini ditetapkan dengan SK KPU No 427/2008. Dalam SK No 383, KPU mengumumkan jumlah pemilih dalam negeri adalah 170.022.239. Saat itu, jumlah pemilih dari Papua Barat dan luar negeri belum dimasukkan.

Dalam daftar calon sementara (DCS), jumlah pemilih di Papua 475.716. Adapun jumlah pemilih di luar negeri, sesuai laporan Departemen Luar Negeri per 5 April 2008, 1.609.737. Semula, KPU diperkirakan hanya akan memasukkan data dari Papua Barat dan luar

negeri. Ternyata, KPU mengubah data dari seluruh provinsi (lihat tabel). Secara keseluruhan, jumlah pemilih kembali menyusut.

Sebelumnya, KPU juga sempat diprotes karena jumlah pemilih menyusut sampai dua juta. Di SK KPU No 139/2008, jumlah pemilih 172.800.716. Tapi, jumlah itu berkurang dua juta saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, mengatakan berkurangnya jumlah pemilih dalam DPT yang baru karena ada kesalahan KPU daerah dalam memasukkan data. "Tujuan dari penetapan DPT ini sekaligus untuk mencari data terakhir yang lebih akurat dan bersifat tetap," kata Hafiz, kemarin.

Hafiz mengungkapkan ada dua pendapat dalam rapat pleno KPU. Pertama, DPT hanya memasukkan data Papua Barat dan luar negeri. Kedua, melakukan revisi sesuai data terakhir yang masuk. "Kawan-kawan bersepakat lebih baik seperti itu (berubah--Red). Jadi, kalau orang menggugat, kami punya data dan dokumennya," kata Hafiz. Hafiz mencontohkan pemilih di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang semula 498.663. Ternyata, jumlah sebenarnya hanya 173.239. Kondisi serupa terjadi di Buton, Sultra, yang berkurang dari 220.920 menjadi 181.124. Di Tolikara, Papua. Dari 196.124 pemilih, menyusut menjadi 125.856. Di Karangasem, Bali, juga berkurang dari 649.688 pemilih menjadi 314.356.

Koordinator Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih KPU, Sri Nuryanti, mengatakan seluruh KPU provinsi sudah menyertakan surat pernyataan mengenai adanya kesalahan memasukkan data. Kendati terjadi perubahan jumlah pemilih, KPU mengklaim tidak berpengaruh signifikan terhadap logistik. Koordinator Pokja Logistik KPU, Abdul Aziz, menilai perubahannya hanya 0,5 persen dari angka semula. Tapi, anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, menilai perubahan DPT berimplikasi serius. Soal logistik yang sudah memasuki atau melalui tender, misalnya, akan dipertanyakan apa dasar penentuan jumlahnya. "Penentuan 102 persen surat suara itu mengacu DPT yang mana?" katanya.

Kemarin, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) melaporkan KPU ke Bawaslu. Bawaslu diminta memanggil KPU dan menginvestigasi penyebab perubahan DPT. "Tak pernah ada pernyataan bahwa DPT yang diumumkan 24 Oktober masih bersifat sementara dan akan direvisi," kata Direktur Nasional Lima, Ray Rangkuti, di kantor Bawaslu, kemarin. Koordinator JPPR, Jeirry Sumampow, juga meminta Bawaslu tak terus-menerus memaklumi KPU. "Bawaslu harus membuat investigasi untuk mendapat data pembandingan," katanya.

Kedua LSM ini bahkan meminta pimpinan KPU mengundurkan diri. Menanggapi desakan itu, Hafiz menyatakan siap mundur jika memang ada mekanisme yang memungkinkan dan membawa kebaikan untuk pemilu. Tapi, anggota KPU lainnya, seperti Sri Nuryanti dan Abdul Aziz, menilai anggota KPU tak bisa mundur di tengah jalan. (Republika)

3. Kultur Politik Rabun Ayam Cederai Demokrasi

Kultur politik "rabun ayam", yang ditandai visi jangka pendek dan pragmatis para pemain demokrasi, mengancam tumbuh kembang demokrasi di Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia disibukkan dengan politik kekuasaan yang menguras energi bangsa.

Demikian sebagian isi pidato kebudayaan Prof Syafii Maarif dalam pidato berjudul "Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional (Di Tengah Kultur Politik Rabun Ayam)" pada Penganugerahan Habibie Award 2008 di Jakarta, Selasa (25/11) malam.

Menurut Syafii, selama para pemain demokrasi terpasung kultur "rabun ayam", sistem tata laksana pemerintahan yang bersih sulit diwujudkan. "Mereka terpaku dan terpuakau kepentingan jangka pendek karena sempitnya lapangan pekerjaan," katanya.

Kondisi itu didukung realita bahwa sebagian kaum intelektual pun kehilangan kejernihan berpikir dan kemerdekaan menilai karena tergodanya politik kekuasaan itu. Akibatnya, orang lupa bahwa bangsa ini memerlukan lahirnya negarawan yang piawai dan bersedia larut memikirkan kepentingan jangka panjang bangsa.

Bagi demokrasi, kultur "rabun ayam" dan persoalan kesejahteraan yang sebatas dijadikan retorika politik menjadi ancaman. Sikap publik akan teruji pada pemilihan umum tahun depan.

Semakin tinggi angka kelompok putih pada pemilu mendatang, berarti lampu merah dalam praktik berdemokrasi. "Jalan keluarnya tinggalkan kultur politik rabun ayam yang mencederai perumahan demokrasi yang kuat dan sehat dalam 10 tahun terakhir," tegasnya.

Sampaikan paparan ilmiah

Siang harinya, para pemenang Habibie Award 2008, menyampaikan paparan ilmiahnya masing-masing. Pemenang Habibie Award untuk bidang ilmu pengetahuan dasar, Jatna Supriatna dari Conservation International Indonesia, memaparkan "Biogeografi Indonesia dan Keberagaman Primata: Pendekatan Biogeografi Pulau dalam Pelestarian Primata di Indonesia".

Di bidang rekayasa, pemenang Habibie Award, Herawati Sudoyo dari Lembaga Biologi Molekul Eijkman, memaparkan "Melalui Keanekaragaman Genom Menguak Kasus Terorisme".

Penerima Habibie Award bidang teknologi, Bambang Widiyatmoko dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, memaparkan "Optical Comb Generator dari Penelitian Dasar Menjadi Produk Teknologi Unggulan."

Penerima Habibie Award keempat dari bidang seni, Sardono W Kusumo, Rektor IKJ, memaparkan "Refleksi Raden Saleh 200 Tahun (1807-2007)".(Kompas)

4. Parpol Diminta Pakai Jaringan

Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sani mengusulkan partai politik lebih memilih jaringan dalam menggaet konstituen.

Menurut dia, langkah itu lebih kuat dibandingkan iklan politik yang memerlukan dana besar. "Iklan tidak bisa diandalkan tanpa dia (partai/ kandidat) membangun basis atau dia punya jasa dan prestasi," katanya kepada SINDO di Jakarta. Arbi mengungkapkan jaringan politik untuk membangun basis sangat penting.

Hal itu jauh lebih kuat daripada pembangunan citra dari iklan politik. Dia mencontohkan Rizal Mallarangeng yang rajin beriklan akhirnya mundur dari pencalonan sebagai kandidat presiden. Hal itu lebih disebabkan dia tak memiliki massa. Berbeda dengan Gus Dur yang tanpa memasang iklan pendukungnya sudah cukup banyak. "Iklan itu bukan satu-satunya cara memengaruhi orang," imbuhnya.

Menurut dia, semestinya iklan hanya menjadi pelengkap untuk meningkatkan popularitas seseorang. Karena, jika menggunakan iklan saja tanpa jaringan, nantinya akan menghasilkan bisnis.

"Pemimpin tidak bisa tumbuh dari iklan, dia harus tumbuh dari bawah," tuturnya. Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Soengeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit yang menjadi Tim Sukses Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dia mengaku selama ini sosialisasi Sri Sultan memprioritaskan aspek jaringan.

"Saya lebih suka strategi MLM (multi-level marketing), tidak melalui iklan-iklan. Seberapa kuat jaringan, itu yang akan menentukan," paparnya. Karena itu, segala sumber daya akan difokuskan untuk membangun simpul-simpul jaringan. Pembangunannya akan dilakukan dari atas sampai bawah, sampai tingkat kecamatan.

"Sekarang sudah ada 6.000 simpul sampai tingkat kecamatan. Targetnya 2 juta simpul," ungkapnya. Sementara itu, sejumlah partai politik juga akan mengubah strategi kampanye. Partai Golkar menyatakan akan mengandalkan kampanye sosial dalam mendekati konstituen.

"Aksi-aksi sosial akan ditambah," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. Menurut dia, kampanye seperti itu dibutuhkan rakyat. Apalagi saat ini kondisi sangat susah terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, banyak yang jadi korban PHK. Maka program seperti padat karya akan diminati dan mendapat simpati masyarakat.

Ketua DPR ini mengakui bahwa partainya tengah melakukan efisiensi terhadap anggaran kampanye. Namun, anggaran yang terkait dengan kegiatan sosial atau insentif penanaman modal padat karya akan diperbesar. Langkah serupa juga ditempuh PPP. Partai ini mengakui apa yang dirasakan partai lain terkait dana juga dialami PPP. Apalagi, partai Kabbah ini saat ini masih terfokus pada sumbangan kader.

"Saya tentu juga akan melakukan evaluasi terkait anggaran iklan," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali kemarin. Krisis ternyata tidak menggerus dana kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena itu, partai yang menokohkan mantan Presiden Soeharto ini mengaku tidak ada pemangkasan anggaran kampanye untuk Pemilu 2009.

Wakil Sekjen DPP PKS Fachry Hamzah menyatakan, partainya tidak menggantungkan dana kampanye kepada pengusaha atau pihak tertentu yang ikut terkena imbas dari krisis ekonomi global. "Sumber dana kampanye kita tidak satu atau dua orang, tapi kader. Jadi, kalau pihak lain terkena dampak krisis global, PKS tidak," ujar Fachry kepada SINDO kemarin.

Fachry menjelaskan, sumber dana kampanye PKS berasal dari kader dan pengeluaran dalam bentuk atribut kampanye diserahkan sepenuhnya kepada pengurus daerah setempat. Fachry juga memastikan bahwa tidak ada donatur tetap dari pengusaha untuk mendanai kemenangan pemilu PKS. "Kita tidak ada hubungan dengan pengusaha sehingga tidak ada akibat signifikan dari krisis global karena sejak awal sudah hemat," tuturnya.

Fachry mengungkapkan, untuk belanja iklan selama kampanye Pemilu 2009, PKS mengalokasikan Rp3 miliar. Sementara untuk atribut dan logistik pemilu lain, partai pimpinan Tifatul Sembiring ini menyerahkan sepenuhnya kepada daerah. Sekretaris Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia Firmanzah mengatakan pemangkasan dana kampanye tidak akan berpengaruh signifikan pada suara yang akan diperoleh partai politik.

Namun, konsekuensinya pemangkasan tersebut serta-merta memaksa partai untuk memperkuat modal sosial yang dimilikinya. "Jika memiliki modal sosial yang baik, partai tidak perlu keluar uang terlalu banyak," ungkapnya.

Modal sosial yang dimaksudkan, menurutnya, adalah jalinan relasi dan jaringan yang kuat ke masyarakat dengan mengefektifkan mesinmesin partai. Jalan lain adalah dengan membuat program yang lebih memberi dampak nyata untuk kehidupan masyarakat. "Masyarakat butuh program yang membumi," katanya. (Koran Sindo)

5. Habibie: Jangan Hambat Orang Jadi Pemimpin

Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang menghambat seseorang untuk maju memimpin bangsa Indonesia.

"Jangan buat kendala-kendala. Peraturan atau Undang-Undang itu kan yang buat manusia, jadi bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu kitab suci seperti Injil dan Al Qur'an," katanya di Jakarta, Selasa(25/11).

Ditemui usai seminar bertema "Pemilu 2009: Konsolidasi Demokrasi dan Transformasi Kepemimpinan Nasional" yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-9 The Habibie Center (THC), Habibie menegaskan bahwa peraturan dibuat harus dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Saat ini, katanya, ada selusin kader bangsa, baik di tubuh partai atau di luar partai, yang siap menjadi calon pemimpin bangsa.

"Itikadnya kan mencari pemimpin yang terbaik bagi masyarakat. Jangan dibatasi harus memenuhi kriteria ini itu, tidak pandang bulu, usianya berapa, kalau kita yakin dia bisa membawa bangsa Indonesia sesuai harapan, ya kita pilih dia," tegasnya.

Karena itu, Habibie berpendapat bahwa yang terbaik adalah presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik dan di luar partai politik.

Habibie mengatakan, soal peraturan yang ada dalam UU Pilpres, katanya, bisa diubah asalkan ada kemauan dari semua pihak.

"Jangan bilang tidak ada waktu tidak lagi, tapi 'you' mau apa tidak," katanya.

Pendiri The Habibie Center itu menambahkan, kader terbaik yang dimiliki bangsa itu diharapkan bisa membuat terobosan-terobosan yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat. (Media Indonesia)

B. EKONOMI

:

1. Pemerintah Jaga Konsumsi Rumah Tangga Penerbitan SBN Disesuaikan

Pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 ini tetap berada di atas 5 persen dan tahun 2009 mendatang pada di kisaran 4,5-5 persen. Untuk itu, pemerintah akan melakukan berbagai stimulus perekonomian, terutama demi menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada pembukaan acara Investor Summit and Capital Market Expo 2008, di Jakarta, Selasa (25/11).

Di hadapan sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari investor, analis, bankir, dan pelaku pasar modal lainnya, Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, jika ingin ekonomi tetap tumbuh di atas lima persen, konsumsi rumah tangga juga harus tetap sehat.

Menurut Sri Mulyani, pada tahun 2009, pemerintah akan berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas lima persen. Upaya itu dilakukan agar perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2009 sebesar 4,5-5 persen dapat tercapai.

Untuk menstimulus pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas lima persen, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan memberikan subsidi pajak sebesar Rp 12,5 triliun, mengeluarkan paket stimulus fiskal, serta menyediakan sumber pembiayaan siaga apabila kondisi pasar benar-benar jatuh (shut down).

Sri Mulyani mengatakan, munculnya kasus-kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan ini menjadi fokus perhatian serius pemerintah karena hal itu akan berdampak negatif terhadap kesehatan konsumsi rumah tangga (masyarakat). Karena itu subsidi perpajakan sudah disiapkan pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan sektor riil, supaya dunia usaha dapat menghindari terjadinya PHK.

Dua persoalan dunia usaha saat ini yang dapat memicu PHK, menurut Sri Mulyani, ialah menurunnya permintaan dan sulitnya modal kerja (karena likuiditas perbankan yang ketat).

Menurut Sri Mulyani, semua pihak, termasuk pemerintah dan dunia usaha mesti melakukan kaji ulang pada area masing-masing. Dirinya pun memantau terus menerus neraca perdagangan dan neraca modal. Berdasarkan indikasi yang ada, katanya, kedua indikator ini masih bisa dipersepsikan kredibel dan berkelanjutan. "Saya mengelola anggaran dan neraca kita. Anda membantu saya dengan tidak membeli dollar AS tanpa kebutuhan yang jelas," katanya.

Pengamat Ekonomi Chatib Basri mengatakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sangat penting untuk dijaga karena 65 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari sektor tersebut. Jika pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tingkat lima persen saja, maka kontribusi pertumbuhan sektor konsumsi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia sudah mencapai 3,25 persen.

"Sisa target pertumbuhan ekonomi 1,75 persen lagi bisa berasal dari pengeluaran-pengeluaran pemerintah," kata Chatib.

Chatib menambahkan untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga tetap tinggi, pemerintah harus segera merealisasikan berbagai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, khususnya yang padat karya. Berbagai proyek ini akan membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Percepatan pencairan

Selain menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga melakukan berbagai langkah lainnya, antara lain melakukan percepatan pencairan anggaran agar likuiditas di pasar rupiah lebih longgar serta memberdayakan peran dan fungsi pusat investasi.

Sementara, saat membuka evaluasi dan persiapan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) 2009, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengibaratkan krisis keuangan yang saat ini terasa di Indonesia seperti banjir kiriman yang kerap menerjang Jakarta.

Cara mengatasi krisis kiriman itu menurut Wapres adalah dengan menjaga dan meningkatkan daya beli serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Jika daya beli menurun, industri dalam negeri seperti tekstil yang susut pasar ekspornya akan makin kesulitan dan terancam untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.

Untuk menciptakan pergerakan ekonomi itu, Wapres mengemukakan, saat ini bukan saat yang tepat untuk memperlambat pencairan pinjaman agar ada uang yang beredar di masyarakat. "Ciptakan pergerakan ekonomi dengan mempercepat penyaluran dana yang tersedia agar masyarakat tidak kekekeringan likuiditas. Jangan tunda dan percepat semua proyek," ujarnya.

Obligasi Internasional

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Utang Departemen keuangan Rahmat Waluyanto, mengatakan, krisis ekonomi global membuat pemerintah harus menyesuaikan rencana penerbitan surat berharga negara (SBN). Pemerintah akan lebih mengandalkan pasar dalam negeri. Nilai obligasi internasional tahun depan pun dikurangi sekitar setengah dari jumlah tahun ini.

"Pemerintah akan konservatif soal penerbitan obligasi internasional. Tahun ini kita terbitkan obligasi internasional sekitar 4,2 miliar dollar AS, tahun depan kita akan kurangi sekitar 50 persen karena pasarnya akan sangat ketat," ujarnya.

Mencermati kondisi likuiditas keuangan yang mengering, pemerintah telah menurunkan target pembiayaan melalui penerbitan surat utang, 30 persen lebih rendah dari tahun ini. Total penerbitan gross surat berharga negara tahun depan hanya sekitar Rp 100 triliun, atau lebih rendah Rp 50 triliun dari tahun ini maupun 2007.

Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan semua upaya yang mungkin untuk mengamankan pembiayaan negara, termasuk menerbitkan semua jenis surat berharga negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2009 diperkirakan mengalami defisit Rp 52 triliun. (Kompas)

2. RI bracing for mass layoffs

Compounding a bleak financial situation that has experts forecasting Indonesia's economy has nowhere to hide from the global financial crisis, the Manpower and Transmigration Ministry has said it expects 40,000 workers to be laid off.

Registered companies employing workers are required to report any plans to the ministry that could result in layoffs, especially of permanent employees.

Myra Maria Hanartani, a director general at the ministry, said the figure for planned layoffs would see roughly half of the number fired and the other half temporarily dismissed.

Temporarily dismissed workers will still receive their basic monthly salary and could be summoned back to work once the company's condition improves.

"The workers the firms said they intended to dismiss so far number 40,486. Around half of them will be permanently dismissed," Myra said.

She said only 2,000 of that number had already been laid off.

With the global financial crisis dragging the world's economies into a recession estimated to be the worst in a decade, economists and business associations have said Indonesia's economy will not be left untouched and that the inherited negative impacts could be long lasting.

While the government in its 2009 state budget forecasts the economy will grow next year by 6 percent, economists have put the figure far lower.

The Economist Intelligence Unit (EIU), a respected global think tank, forecast the country's economy to grow 3.7 percent next year. UBS Securities has put the figure at 2.5 percent — which would be a nine-year low.

Separately, the Indonesian Rattan Furniture and Craft Producers Association (AMKRI), supported the gloomy outlook Monday when it announced the industry could have to lay off some 35,000 workers before the end of the year.

AMKRI chairman Hatta Sinatra said the industry was facing tough challenges due to a raw rattan shortage, in part caused by the implementation of a quotas system regulating rattan exports.

"(Because) of the raw rattan supply shortage, up to 144 rattan craft companies have so far been forced to cease their business operations since the implementation of the 2005 regulation," he said after a meeting with Trade Ministry and Industry Ministry officials.

Secretary-general Abdul Sobur said the closures of the 144 enterprises, all in West Java's town of Cirebon, had resulted in thousands of workers being laid off.

Rattan craft enterprises in Cirebon made up 90 percent of the total number of enterprises in the country, he said.

"With remaining rattan craft enterprises experiencing a 45 percent to 50 percent drop in revenues, more enterprises are expected to fold this year," he said.

The 2005 regulation allows a maximum of 25,000 tons of raw rattan to be exported per year, a maximum of 16,000 tons of semifinished rattan products to be exported from sega and irit plants per year, and a maximum of 36,000 tons of semifinished rattan products from other plants to be shipped overseas per year.

Indonesian Textile Association (API) deputy chairman and head of API's West Java branch, Ade Sudrajat, said the country's textile industry had temporarily laid off over 14,000 workers due to weakening demand for export.

"Almost 700 textile manufacturers have temporarily laid off a total of 14,000 workers as of today (Monday)," he told The Jakarta Post. (The Jakarta Post)

3. Ekspor Batu Bara Harus Untungkan RI

Kementerian Energi, Air, dan Komunikasi Malaysia meminta kepastian pasokan energi batu bara kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi batu bara perusahaan listrik Malaysia, Tenaga Nasional Berhad (TNB), yang akan bertambah tahun depan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Batu Bara (APBI), Jeffry Mulyono mengatakan, permintaan tambahan pasokan energi batu bara dari Malaysia, harus mampu memberikan posisi nilai tinggi pada Indonesia. Sumber energi batu bara nasional bisa menjadi kekuatan politik Indonesia untuk mengontrol Pemerintah Malaysia.

"Apabila Malaysia menginginkan jaminan pasokan batu bara dari Indonesia, mereka juga harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, seperti pemberian jaminan perlakuan yang layak terhadap warga negara Indonesia di Malaysia," ujar Jeffry Mulyono di Jakarta, Senin (24/11).

Dikatakan, kerja sama antarpemerintahan memungkinkan Malaysia mendapatkan kepastian perlindungan atas jaminan pasokan energi batu bara nasional ke negaranya. Namun, jika Malaysia menginginkan kesepakatan jual-beli batu bara harus dilakukan *business to business*.

Menteri Energi, Air, dan Komunikasi Malaysia, Shaziman bin Abu Mansor menuturkan, kebutuhan batu bara Malaysia tahun depan akan meningkat 3 juta ton dibandingkan dengan tahun ini. Indonesia memasok 85 persen dari kebutuhan batu bara untuk TNB.

"Rapat ini merupakan pertemuan yang penting untuk Malaysia. Kami telah mendapatkan kepastian bahwa cadangan batu bara Indonesia masih banyak dan tidak ada masalah memasok batu bara untuk TNB. Ini karena hubungan baik Indonesia dengan Malaysia," katanya. (Suara Pembaruan)

4. Pemerintah Siap Intervensi

Krisis finansial global mengancam ribuan pekerja. Pemerintah akan melakukan intervensi terhadap sektor riil demi mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah saat ini masih membahas bentuk intervensi yang dibutuhkan untuk para pelaku usaha.

"Kami masih bahas apakah lebih pada kebijakan, atau lebih aktif sampai subsidi, atau memberikan insentif yang secara eksplisit bisa membantu industri atau keuangan pelaku usaha agar gelombang PHK tidak terjadi," ujar Sri Mulyani di sela Investor Summit and Capital Market Expo 2008 di Jakarta kemarin.

Krisis finansial global berimbas pada daya tahan perusahaan di Indonesia. Krisis memaksa sejumlah sektor manufaktur padat karya bersiap untuk menghitung biaya PHK massal. Langkah PHK massal diperkirakan terjadi pada 2009 mendatang. Pekan lalu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku sudah mendapat laporan resmi setidaknya terdapat 13.000 tenaga kerja yang akan dirumahkan di seluruh Indonesia.

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah juga terus memantau situasi ketenagakerjaan berdasarkan informasi dari asosiasi pelaku usaha. "Yang dihadapi sektor usaha ada dua, yakni melakukan penyesuaian dengan situasi perbankan dan menghadapi penurunan permintaan produksi," kata Menteri Keuangan ini.

Dia menjelaskan, intervensi sebatas kebijakan misalnya mengupayakan penurunan ekspektasi inflasi, sehingga memungkinkan Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini dengan sendirinya mengurangi beban dunia usaha terhadap lonjakan suku bunga, sekaligus tekanan pembayaran kredit.

"Kita juga akan lihat beberapa kemungkinan. Beberapa solusi yang muncul adalah pembiayaan ekspor. Mekanismenya kerja sama bank dan beberapa perusahaan yang mempunyai reputasi baik," katanya. Dia menambahkan, untuk menggerakkan perekonomian, dalam jangka pendek pemerintah akan mengucurkan dana dalam APBN-P 2008 sebesar Rp120 triliun. Saat ini dana tersebut masih tersimpan di rekening BI.

Sri Mulyani meminta masyarakat tidak menggunakan hasil kegiatan ekonomi dari pencairan anggaran tersebut untuk kegiatan spekulatif. Apalagi untuk dibelikan dolar Amerika

Serikat, sehingga memperburuk nilai tukar rupiah. "Seharusnya ini jadi kegiatan ekonomi. Harusnya likuiditas bisa berputar, jangan dipakai membeli dolar yang tambah membuat runyam," katanya.

Pencairan anggaran dalam jumlah besar adalah untuk membantu sektor riil, setelah perbankan terbelit masalah likuiditas. Kebijakan ini diharapkan bisa memompa kegiatan ekonomi yang terkendala kesulitan mencari kredit perbankan. "APBN akan menjadi tulang punggung," ujar Sri Mulyani.

Kendati begitu, pemerintah tidak akan menanggung semua risiko ekonomi akibat imbas krisis finansial. Masyarakat dan pelaku usaha harus bersama-sama menanggung sesuai peran masing-masing. "Pemerintah akan lihat berdasarkan komoditas, sektor, perusahaan atau industri.

Kita akan lihat apa respons yang memang dibutuhkan dan memang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang tentunya adalah respons yang realistis," katanya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat menuturkan, Kadin dan pemerintah sepakat untuk menginventarisasi sektor padat karya yang telah dan terancam melakukan PHK.

Hasil inventarisasi akan digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan intervensi. "Supaya kita bisa bertahan di 2009 yang akan penuh dengan rintangan dan kesulitan," tandasnya. Identifikasi awal Kadin, industri dimaksud antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan perkebunan.

Menurutnya, upaya-upaya mencegah PHK saat ini tidak bisa lagi hanya menggunakan pendekatan bisnis biasa. "Pemerintah harus melakukan seperti corporate action. Jadi bertindak seperti korporasi, serbacepat. Semisal ada peraturan yang masih menghalangi, segera diubah," katanya.

Hidayat menuturkan, fenomena PHK akan semakin parah pada tahun depan dan mengarah pada level mem- bahayakan. Bila tidak segera ditanggulangi, hal itu bisa mengarah pada gejolak sosial." Kalau angkanya jangan (disebut), nanti bisa menimbulkan spekulasi," paparnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan, kebijakan intervensi di balik layar sudah tidak mungkin bisa mencegah gelombang PHK. Terlebih hanya mengandalkan subsidi pajak sebesar Rp12,5 triliun tahun depan. "PHK itu tidak terhindarkan, China saja menganggarkan lebih dari USD500 miliar untuk stimulus. Pemerintah perlu langsung menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Belanja Anggaran

Di tempat terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta negara-negara di dunia untuk lebih boros membelanjakan anggaran. Pemborosan ini dalam arti positif, yakni pemerintah menggelontorkan dana untuk mendorong bergeraknya sektor riil. "Negara-negara harus sedikit lebih boros. Makin menghemat, makin susah ekonominya.

Kalau semua orang menghemat, tidak ada (orang) belanja, semua toko, industri, tutup. Harus ada spending, tetapi yang bermanfaat, bikin pengairan, listrik," ungkap Kalla di kantornya kemarin. Menurut Kalla, industri dalam negeri akan terancam jika daya beli masyarakat semakin menurun.

Karena itu diperlukan upaya menciptakan kebutuhan di dalam negeri, salah satunya dengan mengurangi impor daging sapi dan pakaian. Kalla mengatakan, dengan menciptakan pergerakan ekonomi, penyaluran dana ke masyarakat bisa dipercepat. Alhasil, tingkat pengangguran bisa ditekan.

"Pergerakan ekonomi mempercepat penyaluran dana yang tersedia agar masyarakat tidak kekeringan likuiditas. Sehingga bisa membeli dan menghidupkan sektor lain, tidak ada pengangguran," lanjutnya. Gubernur BI Boediono mengungkapkan, demi menggerakkan perekonomian, tidak tertutup kemungkinan otoritas moneter akan memangkas tingkat suku bunga acuan, BI Rate.

Namun, pemangkasan tersebut masih menunggu waktu yang tepat. "Oh ya, tinggal timing-nya saja," ungkap Boediono. Menurut Boediono, di tengah krisis keuangan global seperti ini, yang dibutuhkan adalah suasana yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi pada 2009.

Karenanya BI akan melakukan kajian setiap awal bulan untuk melihat apakah pemangkasan suku bunga SBI dimungkinkan. "Itu kan direviu setiap awal bulan. Terus kita lihat suasana pada saat itu," papar mantan menteri koordinator bidang perekonomian ini. (Koran Sindo)

5. Indonesia tourism industry still waiting to rebound

Indonesia, a vast archipelago nation with the world's second-longest shoreline, has consistently underachieved in the tourism sector and 2008 is proving no exception.

"The global economic crisis has started to have an impact," said Sapta Nirwandar, director-general for marketing at the Culture and Tourism Ministry.

"With the looming crisis, I'm afraid we will not have the expected peak of foreign tourist arrivals in December," Nirwandar said, referring to the usual end-of-the-year surge of tourists to the tropical isles.

Despite record-breaking tourism numbers at Indonesia's prime beach resort of Bali, the country will again miss this year's overall target for foreign visitors, he predicted.

Due to the global economic downturn, the government has revised down its targets for 2008 foreign tourist arrivals to "realistic figures" of around 6.4 million, from initial goal of 7 million.

According to the National Statistics Agency, the three quarters spanning January to September brought nearly 4.6 million tourists, a 12.2 per cent increase from the same period of 2007, or 4.1 million.

Indonesia's tourism industry has been hit by a string of calamities over the past five years, ranging from bomb attacks in Bali and Jakarta, to tsunamis and earthquakes, and outbreaks of bird flu and SARS respiratory disease.

Travel warnings issued by several countries have also taken a toll.

2008 began on good footing, until the latest catastrophe - the financial meltdown in the US and Europe - struck.

"Bali this year had a record number of arrivals and was projected to have its strongest year ever, until the recent financial situation, and we have also been impacted by the recent executions of the Bali bombers," said Darryl Marsden, general manager of the Hard Rock Hotel Bali.

Bali hotels are reportedly enjoying 90 per cent occupancy rates this November and December.

Bali, the gem of Indonesia's tourism industry, was hard hit by the 2003 bombings that killed up to 200 people, many of them Australian tourists, followed by another suicide bombing in 2005.

"The outlook for Bali's tourism industry remains positive," Ida Bagus Ngurah Wijaya, head of the Bali's tourism board, told Deutsche Presse-Agentur dpa. "The main issue in Bali is security. As long as security is being guaranteed, there will be more and more foreign visitors to Bali in 2009."

But no one knows to what extent the financial crisis will impact the island.

"Our peak season doesn't actually start until June, so it's hard to say with any certainty what's going to happen in February, March and April," said Marsden.

Istijab Danunegoro, chairman of the Indonesian Hotel and Restaurant Association chapter in Yogyakarta, the Javanese cultural capital that is another prime tourist destination, foresees a slowdown in arrivals next year but still predicts growth.

"With a better cooperation among related parties and better promotion, the outlook for tourism remains positive," Istijab said, projecting tourist arrivals to increase by about 10 per cent in 2009.

Cultural and Tourism Minister Jero Wacik has also called for greater cooperation within the sector, given its huge capacity to create employment and reduce poverty.

"This industry needs interactive efforts between all parties concerned - the government, tourist players as well as the public," Wacik told the Indonesian daily Kompas.

He acknowledged that the country is losing some tourists to neighbouring countries, partly because of limited promotion funds, inadequate transport and infrastructure, and a lack of professional guides.

"Domestic airlines have so far still been unable to cover the requirement of transporting tourists to the destinations," the tourism minister said. "Moreover, when the Visit Indonesia program again rolled out this year, not many domestic airlines and hotel operators welcomed this." (Antara)

C. SOSBUD :

1. Kejar Keterbelakangan Lewat Save Papua

Angka kematian ibu dan anak di Papua sangat tinggi. Aneh. Padahal, Pemprov setempat memiliki dana APBD yang tinggi.

Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang masih cukup tertinggal dalam bidang kesehatan. Karena itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari terus berupaya memperbaiki keterjangkauan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lewat program Save Papua. Program ini banyak melibatkan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Kendala yang paling menyedihkan adalah bahwa kondisi geografis dan masyarakat Papua yang masih minim akses kesehatan. Akibatnya, angka kematian ibu dan anak dan angka ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) cukup tinggi," kata Menkes di sela Pameran Lukisan Firdaus Alalhudi di Libra Ballroom Executive Club, Hotel Sultan, Jakarta, Senin malam (24/11).

Menurut Menkes, Papua merupakan saudara yang betul-betul terbelakang. Kita tidak pernah bisa menjangkau mereka secara langsung. "Sekarang, saya berupaya menembus semua itu," katanya.

Selain terobosan Puskesmas berjalan, Menkes mengatakan, ia juga banyak terbantu oleh para aktivis LSM yang terus ikut memantau perkembangan pelayanan kesehatan di Papua. "Kami dibantu oleh 700-an kader aktivis. Mereka ikut menjalankan Desa Siaga di Papua," kata Menkes lagi seraya menunjuk salah satu lukisan favoritnya yang bersusana aktivitas pasar karya Firdaus.

Dikatakan Menkes, pihaknya menggunakan jalur aktivis untuk memberdayakan masyarakat di Papua agar dapat melindungi diri sendiri dari tekanan-tekanan. Sebab, warga Papua selama ini acap menjadi obyek kepentingan-kepentingan tertentu.

Pemilihan Papua sebagai Desa Siaga karena di daerah itu angka kematian ibu dan anak sangat tinggi. Begitu juga jumlah ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Aneh. Padahal, Pemprov setempat memiliki dana APBD yang tinggi.

Itulah sebabnya, Menkes prihatin dengan pemerintah daerah setempat yang kurang memperhatikan masalah kesehatan. "Hal itu bisa terlihat dari minimnya anggaran untuk kesehatan," katanya.

Menurut Menkes, rata-rata dalam sebuah kabupaten, rakyat cuma mendapatkan biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp5 ribu per orang. Aneh lagi, jalanan pun masih seperti sumur," katanya, prihatin. Dikatakan, dana—baik dari pemerintah pusat maupun daerah—sebetulnya cukup tersedia. Tapi banyak yang tidak pernah sampai ke rakyat.]

Sementara itu, Menkes mengomentari pameran lukisan yang terinspirasi oleh terobosan dirinya dalam dunia kesehatan global. Ia menyatakan sangat berterimakasih kepada sang pelukis, Firdaus Alalhudi. "Apalagi sebagian dari hasil lukisan ini disumbangkan untuk program Save Papua. Saya sangat bangga," katanya.

Dalam pameran itu, Firdaus menyiapkan tiga lukisan bergambar profil Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. Mengapa, dan untuk apa? "Seorang menteri yang berjiwa nasionalisme tinggi memang sepatutnya mendapatkan penghormatan seperti itu. Menkes orang yang apa adanya. Ia berani mengatakan yang benar," kata pelukis kelahiran Kebumen, 22 November 1954 ini, lantang. (Jurnal Nasional)

2. 29 ABK Hilang di Pasifik

Sebuah kapal penangkap ikan, yang sebagian awaknya dikabarkan merupakan warga negara Indonesia (WNI), ditemukan dalam kosong setelah terbakar di perairan Pasifik Selatan.

Harapan untuk menemukan 29 anak buah kapal (ABK) semakin kecil. Bangkai kapal Tai Ching 21 yang hangus ditemukan di dekat Kiribati pada 9 November lalu dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam kapal.

ABK Tai Ching 21 berasal dari Taiwan, China, Indonesia dan Filipina, namun masih simpang siur mengenai kepemilikan kapal tersebut, apakah milik Korea atau Taiwan.

Perwira Angkatan Laut Fiji Anare Rasunusunu mengatakan, kapal itu sedang ditarik ke Taiwan, dan dari sana mereka "akan mengadakan penaksiran dan investigasi."

Pencarian, yang ditangguhkan akhir pekan, awalnya dilakukan oleh salah satu pesawat C-130 Hercules milik AU Amerika Serikat, dan disusul oleh pesawat Orion milik AU Selandia Baru.

Setelah berlangsung lebih dari 30 jam, pencarian dari udara di perairan utara Fiji dengan cakupan 21.000 mil persegi tidak mendatangkan hasil.

Rasunusunu mengatakan, Tai Ching tidak mengirimkan pesan darurat. Belum dipastikan apakah persediaan makanan, air, atau alat bantu untuk bertahan hidup ada dalam perahu penyelamat atau di rakit apung kapal, yang juga belum ditemukan.

Transmisi pesan radio terakhir dari kapal itu, yakni panggilan telepon melalui telepon satelit dari kapten kapal, tercatat dilakukan pada 28 Oktober lalu.

Kru sebuah kapal penangkap ikan Korea menemukan kapal Tai Ching 21 dalam keadaan kosong di dekat Kepulauan Phoenix, Kiribati, 12 hari kemudian.

"Kapal itu tidak lagi berasap, dan ini diindikasikan kebakaran di kapal telah padam beberapa hari sebelumnya," kata Rasunusunu.

Jalani Pemeriksaan

Sementara itu, satu dari enam orang ABK asal Indonesia yang selamat dalam peristiwa tenggelamnya kapal Crete Cement berbendera Bahamas di perairan Oslofjord, Norwegia, untuk sementara masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Menurut keterangan resmi dari Departemen Luar Negeri di Jakarta, Selasa, Tim KBRI Oslo telah membantu proses pemulangan lima dari enam ABK, yaitu Herman, Apriyanto, Naib Efendi, Edi Hariono, dan Mahmud ke Indonesia dengan pesawat Lufthansa LH -778 via Frankfurt pada Jumat lalu.

Namun seorang ABK, Amin Tohari yang berfungsi sebagai juru mudi, belum diizinkan meninggalkan Norwegia karena masih menjalani proses pemeriksaan oleh kepolisian pada pekan ini.

Dua belas awak kapal Crete Cement ditemukan dalam keadaan selamat pasca tenggelamnya kapal milik perusahaan Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS-Norway itu pada Rabu pekan lalu. (Suara Karya)

3. Hari Guru Nasional 2008 Guru Ancam Mogok Mengajar

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi PP Guru, sebelum puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada 2 Desember 2008. Jika tidak, dikhawatirkan terjadi reaksi spontan dari para guru di daerah untuk melakukan aksi mogok mengajar

Sulistiyo kepada wartawan, Senin (24/11), mengungkapkan bahwa RPP Guru sudah 18 bulan tetapi belum juga disahkan menjadi PP. Padahal, jika kemudian para guru melakukan aksi mogok mengajar, akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Yudhoyono, terutama menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden pada 2009 mendatang

"Saya sebagai Ketua Umum PGRI tidak akan mengarahkan sikap politik para guru, karena para guru pun tanpa dikomando akan memiliki sikap dan pilihan politik sendiri, berdasarkan hati nurani mereka masing-masing. PGRI juga tidak punya kekuatan untuk mengendalikan reaksi guru," lanjutnya. Tetapi, mogok mengajar bisa terjadi karena para guru sudah beberapa kali dibohongi, diabaikan dan dipermainkan oleh pemerintah, tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo yang ditemui di sela-sela upacara Hari Guru Nasional (HGN), Selasa (25/11) pagi, mengingatkan kepada asosiasi atau organisasi profesi guru agar semakin fokus pada upaya meningkatkan profesionalisme guru, dan tidak terkooptasi oleh salah satu kekuatan politik tertentu. Ini karena para guru yang terhimpun dalam organisasi profesi adalah milik seluruh bangsa, sehingga punya kewajiban moral untuk menjaga independensinya dan hanya mengabdikan pada kepentingan bangsa

Begitu pula Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Baedhowi, mengimbau kepada para guru supaya tidak melakukan mogok mengajar. "Pasalnya, kalau menuntut profesionalisme dan kesejahteraan, tanpa ada RPP Guru pun, pemerintah sudah melakukan banyak hal, khususnya sertifikasi guru," kata Baedhowi

Ketua Umum PGRI Sulistiyo mengatakan, PP Guru sangat penting untuk segera disahkan, karena selain menjadi dasar implementasi UU Guru dan Dosen, PP tersebut juga menjadi fondasi agar kesejahteraan dan profesionalisme guru bisa berjalan seiring. "Karena itu, saya (Senin pagi-red) sudah menghubungi Mendiknas dan beliau mengatakan sudah paraf, dan kini di tangan Setneg (Sekretariat Negara)," jelasnya.

Di pihak lain, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman berbeda pendapat. Ia justru meminta agar RPP Guru direvisi terlebih dahulu, karena belum menjamin kesejahteraan guru swasta, terutama terkait dengan tunjangan fungsional dan jaminan sosial. (Sinar Harapan)

D. HANKAM :

1. Anggaran Pertahanan Terimbas Krisis Ekonomi

Krisis keuangan global dipastikan mulai berdampak pada alokasi anggaran di Indonesia, salah satunya terkait anggaran belanja pertahanan. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 1615/MK.02/2008, terkait pengurangan anggaran 3,9 persen.

Pengurangan sebesar 3,9 persen tersebut juga diterapkan pada pos belanja pertahanan yang dipastikan akan sangat memengaruhi alokasi belanja modal dan alokasi anggaran terkait program perekrutan prajurit TNI.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (24/11), sesudah menggelar rapat terkait masalah itu dengan sejumlah perwira tinggi perencanaan, logistik, dan personel dari Markas Besar TNI dan ketiga matra angkatan di Dephan.

"Akibat krisis keuangan global tentunya bakal terjadi dinamika dalam mekanisme anggaran pertahanan kita," ujar Sjafrie.

Meski begitu, terkait proses pengadaan senjata yang tengah berjalan, baik melalui fasilitas pendanaan kredit ekspor (utang luar negeri) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (rupiah murni), pihak Dephan, menurut Sjafrie, akan tetap mengupayakan agar tetap berlanjut.

Seusai menerima kunjungan delegasi Kementerian Pertahanan China yang dipimpin Jenderal Chi Wanchun, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono juga memastikan penundaan rencana kerja sama pendanaan dan produksi bersama persenjataan.

"Mereka masih fokus pada penanganan dampak krisis keuangan global di dalam negeri. Seperti diketahui, Pemerintah China baru mengucurkan dana 586 miliar dollar AS untuk menggalakkan perekonomian dalam negeri China," ujar Juwono. (Kompas)

E. HUKUM :

1. DPR Belum Pastikan Penyelesaian UU Tipikor

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono mengkhawatirkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melampaui batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekhawatiran itu muncul karena DPR tidak dapat memastikan batas akhir penyelesaian pembahasan RUU tersebut

Demikian pidato Ketua DPR pada pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2008-2009 di Jakarta, Senin (24/11). Agung menyatakan DPR dalam bulan-bulan ke depan akan lebih banyak sibuk dengan kegiatan sosialisasi atribut dan kampanye partai menjelang pemilu. Sedangkan MK menetapkan batas akhir 2009 untuk membentuk UU Pengadilan Tipikor.

"Apabila tidak memberikan prioritas dalam penyelesaiannya, kami khawatir banyak kendala yang dihadapi, terutama soal waktu," tegas Agung Laksono

Menanggapi pernyataan Ketua DPR, anggota Komisi III DPR Eva Kusumah Sundari dari F-PDIP mengatakan cepat atau lambatnya pembahasan sebuah RUU di DPR sangat tergantung pada sikap pimpinan fraksi dan pimpinan panitia khusus (pansus) RUU tersebut.

Terhadap RUU Pengadilan Tipikor, Eva Kusumah Sundari mengatakan, sempitnya waktu dan intensitas kegiatan politik saat ini mengakibatkan pembahasannya tersendat dan terkesan fraksi-fraksi tidak menjadikannya sebagai prioritas

“RUU itu call politiknya tinggi. RUU itu sangat krusial dan dampaknya sangat tinggi bagi penegakan pemberantasan korupsi. Pembahasan RUU seperti itu sangat ditentukan oleh sikap pimpinan fraksi dan pimpinan pansus untuk mengatur jadwal sidang,” kata Eva Kusumah Sundari

Jika hingga batas waktu yang ditetapkan MK, RUU Pengadilan Tipikor belum disahkan maka Pengadilan Tipikor pun tidak ada dan pengadilan kasus korupsi dikembalikan ke pengadilan umum. Artinya, lanjut Eva Kusumah, akan terjadi penurunan kinerja untuk memberantas korupsi.

“Saat ini kinerja pengadilan belum memadai. Kalau kerja pengadilan biasa bagus, tak perlu Pengadilan Tipikor, tetapi yang terjadi kerja pengadilan biasa hanya begitu-begitu saja,” tambahnya. (Sinar Harapan)

2. Penyidik Ditarik, Perkara KPK Bisa Terganggu

Penarikan beberapa pejabat, penyidik, maupun jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bukan sekadar masalah kewenangan antarlembaga.

Lebih dari itu, manajemen penanganan perkara di KPK dipertanyakan. “Bagaimana bisa ada orang yang tahu persis kasus besar di KPK kemudian dimutasi. Orang ini yang paham betul kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia),” ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar kemarin.

Zainal menanggapi penarikan Direktur Penyidikan pada Deputy Penindakan KPK Brigjen Pol Bambang Widaryatmo dan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK AKBP Akhmad Wiyagus oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan telegram rahasia Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Bambang ditarik karena mendapat tugas baru sebagai kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Markas Besar (Mabes) Polri.

Adapun Wiyagus ditarik menjadi kepala Kepolisian Resor Sumedang, Jawa Barat. Seperti diketahui, Bambang ditarik saat belum penuh setahun bertugas sebagai direktur Penyidikan KPK. Dilantik pada 15 April 2006, menggantikan Ade Rahardja, Bambang dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara mengenai kasus yang disidik KPK.

Dia memimpin langsung penggeledahan sejumlah ruang kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan suap alih fungsi hutan. Wiyagus lain lagi. Perwira polisi ini salah satu penyidik senior di KPK dan pernah menangani sejumlah kasus besar. Kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR, korupsi di Komisi Pemilihan Umum, dan penggeledahan ruang kerja mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

Setelah empat tahun menjadi penyidik, dia dilantik sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 21 Agustus lalu. Tidak lama menjabat direktur Pengaduan Masyarakat, dia menyerahkan kasus dugaan suap terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior BI ke tahap penyidikan.

Kemarin Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto membenarkan penarikan beberapa jaksa KPK, namun tidak bersedia menyebut nama jaksa yang ditarik tiga pekan lalu. Mereka ditarik untuk ditempatkan di kejaksaan negeri. Belakangan, penyidik perempuan, AKBP Sri Adiningsih dikabarkan juga akan ditarik dari KPK.

Adiningsih adalah penyidik yang berhasil mengungkap dugaan korupsi Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan, Riau, senilai Rp12,3 miliar. Bibit mengaskan bahwa penarikan ini sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi lembaga asal mereka memiliki kewenangan menarik personel yang ditugaskan di KPK.

Tetapi penarikan ini menimbulkan konsekuensi besar bagi KPK. Komisi antikorupsi harus mengeluarkan biaya bagi calon pengganti mereka, sementara yang baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi. “Rekrutmen pegawai harus mengeluarkan biaya banyak,” katanya.

Tuntaskan Kasus Dulu

Menanggapi penarikan para penyidik ini, Zainal Arifin Mochtar menyatakan kasus-kasus yang dihadapi KPK menjadi taruhan. Tidak hanya kasus BLBI, tetapi juga sejumlah kasus yang belum tuntas seperti aliran dana BI dan dugaan suap pemilihan Deputy Gubernur Senior BI menjadi tumpukan kasus yang seharusnya diselesaikan oleh KPK.

Penarikan Bambang dan Wiyagus, menurut Zainal, justru menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan KPK menuntaskan kasus ini. Idealnya KPK dan Polri membiarkan dulu penuntasan kasus ini, baru dilakukan mutasi. “Ini yang membuat kita sulit percaya. Jangan dikaburkan promosi jabatan,” kata Zainal.

Zainal sepakat saja penarikan personel Polri dari KPK adalah sesuatu yang dibenarkan. Namun, dia menekankan bahwa KPK dan Polri mempunyai kepentingan yang lebih besar, yakni penindakan korupsi. Dalam pandangan yang lebih jauh, Zainal malah menilai penarikan ini sebagai upaya melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Walau sulit dibuktikan, dia melihat ada upaya pihak luar yang merasa terusik dengan kinerja KPK selama ini. "Jangan-jangan ini adalah bagian dari serangan balik koruptor," katanya. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai pemindahan kedua pejabat ini sebagai proses yang janggal.

Kejanggalan ini terlihat karena pertimbangan yang kurang jelas, apalagi alasan klasik yang selalu digunakan oleh pihak Polri adalah mutasi sebagai suatu yang biasa. Alasan ini dinilai sumir dan bisa dianggap sebagai suatu pengasingan. "Penarikan kedua personel KPK ini juga terkesan tergesa-gesa mengingat mereka belum lama menjabat sebagai direktur di KPK," kata Adnan.

Senada dengan Zainal, Adnan melihat ada tujuan tertentu di balik penarikan ini. ICW merasa khawatir jika pemindahan ini benar-benar terkait dengan upaya "mengamankan" beberapa kasus korupsi besar yang ditangani KPK. Jika hal ini terjadi, dia melihat mutasi kedua perwira Polri di KPK merupakan bagian dari skenario pihak-pihak tertentu menutup penanganan kasus korupsi.

"Jika benar seperti ini, KPK sedang diancam bahaya besar. Padahal, KPK adalah harapan satu-satunya dalam pemberantasan korupsi," kata Adnan. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menambahkan, ke depan KPK akan mengupayakan untuk memperbaiki perjanjian dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga lain yang pejabatnya diperbantukan di KPK.

Selama ini pejabat dan pegawai KPK yang berasal dari lembaga pemerintah terikat kontrak empat tahun kerja dan sekali perpanjangan. Nyatanya, sering kontrak tidak sesuai kenyataan karena mereka bisa saja ditarik sewaktu-waktu.

Pembaruan perjanjian nantinya diharapkan tidak menimbulkan masalah antarlembaga. "Agar mereka bekerja lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak," desaknya. (Koran Sindo)

3. Bea Cukai Berhasil Cegah 297 Kasus Penyelundupan

Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) berhasil mencegah penyelundupan barang sebanyak 397 kasus selama Januari hingga November tahun 2008.

"Potensi pencegahan akan bertambah pada tahun 2008 karena masih tersisa satu bulan lagi," kata Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPBC Bandara Internasional Soetta, Eko Dharmanto di Tangerang, Selasa.

Dharmanto menuturkan, hasil pencegahan upaya penyelundupan ataupun pengiriman barang tanpa pemberitahuan pada tahun 2008 mengalami peningkatan cukup tinggi dibanding tahun 2007 yang mencapai 320 kasus.

Berdasarkan rekapitulasi data KPBC Soetta, jumlah pencegahan barang yang paling banyak secara kuantitas berupa penyelundupan obat-obatan dan bahan kimia mencapai 144 kasus, peralatan komunikasi dan elektronik (97 kasus), replika senjata dan suku cadang (56 kasus), alat bantu seksual (29 kasus), narkotika dan psikotropika (26 kasus), perhiasan berlian (8 kasus), barang cagar budaya (6 kasus) dan sisanya seperti pelanggaran pencucian uang serta pelanggaran hak cipta.

Namun demikian secara kuantitas, jumlah kasus paling berpotensi merugikan pemasukan bea pajak bagi negara yakni penyelundupan perhiasan berlian karena memiliki nilai jual yang tinggi.

Dharmanto mengatakan, petugas KPBC Soetta hampir setiap bulan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang tersebut baik dari luar negeri maupun dalam negeri dengan jumlah kasus sebanyak 24 hingga 52 kasus setiap bulannya.

Dharmanto menambahkan, modus operandi terbaru yang dilakukan pelaku untuk menyelundupkan barang yakni dengan cara ditelan atau dimasukkan ke dalam buku yang tebal. (Media Indonesia)

F. OLAH RAGA

: Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. RI climate follows the sun

CO₂ is not an air pollutant. It is plant food. All life on Earth depends on it. It is natural. It forms the bubbles in bread, champagne, and Coca-Cola. You breathe it out, and plants breathe it in.

The Earth contains a lot of CO₂, but the atmosphere contains so little that the UN's climate panel, the IPCC, rightly calls CO₂ a "trace gas". The scientific mystery is why the air does not hold more CO₂ than it does. Half a billion years ago there was almost 20 times today's CO₂ concentration.

Most farmers would prefer to grow crops under much higher concentrations of CO₂ than today's 385 parts per million -- less than one-twenty-fifth of one per cent of the atmosphere. To feed the world, low CO₂ concentration is not such a great idea. High concentrations are better -- and cause no harm. Experiments have shown that even delicate plants like orchids thrive at CO₂ concentrations of 10,000 ppm.

This is why Supreme Court Judge Anthony Scalia in the U.S. has declared that if CO₂ is to be labeled "air pollutant" then so must frisbees and flatulence.

What about the danger of overheating the Earth by CO₂? Al Gore is spending \$300 million telling us "global warming" will be a catastrophe. Yet a survey of 539 scientific papers containing the words "global climate change" and published between January 2004 and February 2007 found not a single paper that provided any evidence that "global warming" would be catastrophic.

It does not matter how many scientists or politicians say that more CO₂ will cause a catastrophe. To true scientists, what matters is whether any real-world data support the idea.

If CO₂ is a powerful greenhouse gas, have we seen any great warming trend in Indonesian temperature history? No. Recent temperatures, according to the Tyndall Centre for Climate Change Research, have been scarcely warmer than they were 70 to 100 years ago. Instead of a strong warming trend, the Indonesian data are dominated by year-to-year changes as well as natural oscillations every 50 to 100 years.

It is remarkable to find documents on the Internet, circulated by WWF-Indonesia, trying to scare the unsuspecting public by saying that temperature in Indonesia has "increased by 0.3 0C" over the 20th century and that one can expect additional warming of 0.1 to 0.3 0C per decade for the next 20 to 100 years.

In a humid, equatorial nation like Indonesia, with annual temperatures between 23 and 320C, there is little chance of seeing those predicted warming trends, or any of the predicted changes in rainfall.

Professor Mezak Ratag of the Indonesia National Agency for Meteorology & Geophysics says: "The output from different models is often different and sometimes contradictory. For example, (a UK climate model) predicts increases in temperature and decreases in precipitation for Indonesia, while (a German model) predicts an increase in both temperature and precipitation."

When climate models are saying that both increased and decreased rainfall is possible, they are not actually making any predictions.

Worse, climate scientists from Stanford University and the University of Washington in the U.S. recently admitted that: "The islands of Java and Bali are not even represented as land in many global-circulation models (used by the UN's climate panel, the IPCC)."

The 100-year mean temperatures over 1901-2000 for March-April-May, June-July-August, September-October-November and December-January-February are 26.2, 25.6, 26.1 and 25.90C, respectively. This confirms the clear dependence of the basic climatology of Indonesia on the arrival and relative intensity of the Sun overhead. More sun means warmer weather, and vice versa. It is as simple as that.

More sun also means more rain, except that during the December-January-February season there is an additional large contribution from the northwest monsoon and the southward migration of the inter-tropical rainbelt.

Look to matahari (the Sun in Bahasa Indonesia) rather than CO₂ as the key player in Indonesia's climate.

Therefore, cutting CO2 emissions by sharply decreasing the use of gasoline in cars or fossil fuels will make no difference to the weather. It will merely lead the foolish to feel good about "Saving The Planet".

Even if the planet needed saving, all proposed mitigation measures would be futile. It would be cheaper and less irresponsible to adapt to warmer weather as -- or rather if -- necessary.

We have already seen food prices double and triple worldwide because the "green" movement told us biofuels would "Save The Planet". Science, however, demonstrates that biofuels have a bigger carbon footprint than gasoline.

Foolish mitigation measures that owe everything to political fashion and nothing to scientific rigor are already harming the poor. It is time to stop the panic about CO2 before anyone gets hurt -- or even killed.

Willie Soon and Christopher Monckton are the chief science and policy advisers to the Science and Public Policy Institute based in Washington DC. Willie Soon is an invited speaker at the International Symposium on Climate and Weather of the Sun-Earth System, hosted by Indonesia's National Agency for Meteorology & Geophysics in Jakarta from Nov. 24-26, 2008. (The Jakarta Post)

III. ARTIKEL :

1. Demi Guru Oleh Nadlifah Hafidz

Benarkah pemerintah benar-benar sudah memedulikan atau memanusiaikan profesi guru? Maksimalakah pemerintah dalam memperlakukan profesi guru sebagai profesi terhormat? Apakah janji menyejahterakan guru, yang selama ini disuarakan oleh pemerintah, sudah terwujud secara empiris?

Tampaknya pemerintah masih pintar berjanji atau manis dalam memberikan iming-iming kepada guru. Guru diajaknya berusaha mengerahkan segala daya dan berkompetisi memperebutkan tunjangan. Ajakan ini, kemudian disambut oleh guru di berbagai penjuru daerah. Ini dapat terbaca lewat laris manisnya program studi yang membuka jurusan kependidikan atau yang memberikan ruang berkarier di jalur keguruan.

Sayangnya, pepatah yang berbunyi "besar pasak daripada tiang" tampaknya sekarang tepat dialamatkan kepada pemerintah. Pasalnya antara dosis kemauan yang cukup besar dalam memperhatikan profesi guru tidak sebanding dengan kemampuan. Ada janji mulia yang secara politis-ekonomi hendak diberikan kepada guru dalam bentuk pemberian kesejahteraan, namun belum terwujud, yang oleh guru mulai dianggap sebagai impian.

Faktanya, pemerintah sudah menjanjikan opsi bagi guru yang mau bersusah payah mengisi portofolio dengan imbalan satu kali gaji pokok bagi yang dinyatakan lulus sertifikasi. Berbagai cara sudah dilakukan oleh guru untuk mencapai standar atau variabel yang digariskan tim penilai supaya bisa mengumpulkan poin agar lulus.

Kalau, kemudian perjuangan berat guru tersebut ternyata gagal, tertunda, terlaksana, tapi tak sesuai dengan yang dijanjikan, atau bahkan dibatalkan dengan alasan klise "anggaran negara ternyata tidak mencukupi" atau masih menunggu pembahasan yang lebih serius, maka bisa saja kondisi ini identik dengan pelecehan dan pendehumanisasian profesi guru.

Keluhan

Beberapa guru yang kebetulan bertemu dengan penulis menyampaikan keluhannya sehubungan dengan tidak jelasnya janji pemerintah berkaitan dengan tunjangan profesi, padahal untuk lulus sertifikasi mereka sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Di antaranya, ada yang mendapat kabar angin, yang menyebut kalau tunjangan akan dicairkan awal tahun ini, sementara yang lain menyebutkan pemerintah tak akan punya anggaran yang bertepatan penyejahteraan guru.

Di berbagai media massa sering diberitakan tentang tunjangan profesi guru yang terancam tak terbayar. Di Jatim, misalnya, diprediksi ribuan guru yang terancam tak menerima tunjangan profesinya akibat perbedaan antara jumlah guru yang lulus sertifikasi dengan jumlah yang akan menerima tunjangan.

Data di Diknas Jatim, misalnya, menyebutkan, dana APBN yang dititipkan di Provinsi Jatim untuk membayar tunjangan profesi, sebesar Rp 1,8 juta per bulan, hanya diperuntukkan

bagi 15.700 guru, padahal pada sertifikasi kuota 2006 dan 2007, guru yang lulus mencapai lebih dari 60 persen dari total 32.000 kuota se-Jatim. Jika persentasenya sekian, maka seharusnya yang dibayar untuk 19.200 guru. Sedangkan, dana konsentrasi APBN yang digunakan Rp 660 miliar (Farida, 2008).

Kasus seperti itu sudah lama dikhawatirkan oleh Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi yang menyebutkan bahwa pemerintah tak akan mudah untuk memenuhi (membayar) tunjangan profesi guru yang lulus sertifikasi. Serapan dana yang diperlukan bagi penambahan (peningkatan) kesejahteraan guru ini tidaklah main-main (sangat besar). Bahkan, ada seorang kawan dari kalangan ahli ekonomi yang mengkalkulasikan kalau sertifikasi terbayar semua (mulai dari guru hingga dosen) di negara ini, maka negara akan bangkrut.

Dari kasus tersebut, pemerintah perlu arif menyikapinya dan tidak sebaliknya mencari kambing hitam dengan menyalahkan sistem sertifikasinya atau menyudutkan guru dengan menuding adanya praktik "main mata" dalam proses sertifikasi. Pasalnya, tuduhan dan pola praduga bersalah (presumption of guilt) ini hanya akan semakin menyakiti profesi guru, atau berusaha mengkriminalisasi dunia pendidikan.

Idealnya, masyarakat (guru) tak perlu "didustai". Pasalnya, guru atau masyarakat sekarang semakin cerdas dengan apa yang sedang dan akan menyimpannya. Ketika pemerintah berjanji hendak mewujudkan hak kesejahteraannya, tidak serta-merta masyarakat menilainya sebagai kepastian, apalagi masyarakat juga paham kalau elite kekuasaan di negeri ini gampang menabur janji daripada berusaha menunjukkan bukti (merealisasikan janji).

Penghematan

Guru bisa marah besar layaknya komunitas buruh yang hak-haknya diganjil, didiskriminasikan, atau ditumbalkan. Kemarahan guru ini beberapa kali ditunjukkan melalui berbagai bentuk aksi demonstrasi. Menyikapi potret tersebut, barangkali pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penghematan atau mengurangi belanja politik (political cost) dan gaya kepemimpinannya untuk dialihkan guna menutupi kekurangan anggaran kesejahteraan sertifikasi profesi guru.

Jerih payahnya dalam mengumpulkan berkas-berkas sertifikasi yang dijadikannya sebagai "garansi" merebut kesejahteraan, sudah selayaknya mendapatkan perhatian maksimal.

Negara-negara yang sukses membangun dunia pendidikan tak lepas dari dampak gaya hidup elite kekuasaannya. Ketika gaya hidup elitnya membumikan "sufisme struktural" atau mengkhusukkan komitmen dari godaan kekayaan, tidak gemar memboroskan kekayaan negara, maka selain masyarakat tidak perlu memikirkan biaya pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi, gurunya pun terjamin kesejahteraannya. Di negara ini, seorang pejabat penting, misalnya, tidak merasa malu makan di warung demi menempatkan dunia pendidikan (guru) sebagai "bidang istimewa" komitmen amanatnya.

Sufisme struktural, seperti disebut oleh Miqdad (2006), suatu deskripsi dunia masyarakat ber-Tuhan yang tidak menduniakan dunia, namun tetap memedulikan atau menunjukkan tanggung jawab keduniaannya, rajin menegakkan amanat sosial, dan mengalinasikan diri dari tawaran harta atau pesona duniawi lainnya yang bermaksud menjerumuskan dalam kemungkinan.

Belanja politik dan kunker (kunjungan kerja) eksekutif ataupun legislatif, serta tunjangan lain yang sering "melangit" sudah saatnya sebagian dialihkan (dibagi) untuk menutupi lubang kepentingan dunia pendidikan, dalam hal ini kemaslahatan (kesejahteraan) guru. Kunker dan seremonial struktural, yang notabene sebagai pengistimewaan elite eksklusif berbiaya tinggi, sudah seharusnya dievaluasi ulang demi kepentingan guru.

Sungguh tidak sepatasnya, kalau komunitas elite kekuasaan bisa dengan enak memanfaatkan anggaran negara atau daerah, sementara di sisi lain, terdapat ribuan guru yang terpuruk dalam kondisi ekonomi marginal. Kalau seperti ini masih juga tidak disadari oleh pemerintah, rasanya dunia pendidikan ke depan masih akan sulit mencapai ranah keberdayaan dan kemajuan.

Guru yang gagal dimanusiakan oleh negara akan berakibat terjadinya fatalisme edukasi, suatu kondisi yang memosisikan guru sebatas sebagai sosok penyampai ilmu pengetahuan, bukan teladan utama yang mengerahkan totalitas keilmuan dan kepribadian agungnya demi kemajuan pendidikan.

2. Solusi Kasus Adam Malik oleh: Asvi Warman Adam

Buku Tim Weiner, Membongkar Kegagalan CIA, 2008, bukan hanya membongkar rahasia intelijen Amerika Serikat (AS) itu. Buku itu juga membongkar rahasia mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik.

Adam Malik yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional pada 1998 itu dituduh sebagai agen CIA. "CIA memiliki seorang agen yang mempunyai posisi baik: Adam Malik, mantan Marxis berusia 48 tahun yang mengabdikan sebagai duta besar Soekarno di Moskow dan menteri perdagangan."

Konon dia direkrut oleh Clyde McAvoy agen CIA di Jakarta pada 1964. Clyde McAvoy dalam wawancara tahun 2005 berujar "Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik". McAvoy menambahkan bahwa Malik adalah "pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut"(hlm 330). Clyde McAvoy adalah operator CIA yang bertugas di Indonesia pada 1964–1966.

Setelah pensiun dia tinggal di Hawaii dan terkadang menulis tentang masalah intelijen. Dia pernah menulis tentang konflik Uni Soviet dan RRC dalam peristiwa G30S. Tentu sangat masuk akal bila McAvoy bertemu Adam Malik yang memiliki jaringan sangat luas. Adam Malik sebagai mantan wartawan tentu sangat paham dalam mencari dan memperoleh informasi. Tetapi bila McAvoy mengaku bahwa dia merekrut Adam Malik, apa buktinya?

Dalam sejarah lisan dikenal apa yang disebut sebagai "kesempatan kedua". Seseorang yang pada masa lampau tidak memiliki atau melaksanakan peran yang memuaskan dirinya, akan berupaya untuk melebih-lebihkan kehebatannya bila ditanya. Apakah McAvoy dalam hal ini telah menggunakan "kesempatan kedua" itu?

Tim Weiner sendiri menginterview Clyde McAvoy, operator CIA yang bertugas di Jakarta dalam masa peralihan 1964-1966, pada tahun 2005. Repotnya, menurut informasi, Clyde McAvoy itu sudah meninggal di Hawaii bulan Maret 2008. Jadi tidak ada bukti tertulis, hanya ada satu pengakuan tunggal dan ternyata orang itu sudah berada di liang kubur sehingga tidak mungkin lagi bersaksi.

Perjalanan waktu yang demikian panjang mungkin saja menyebabkan seseorang melupakan sesuatu atau keliru dalam mengingat. Dalam buku ini disebutkan bahwa McAvoy telah menyerahkan uang sebanyak USD10.000 melalui Adam Malik sebagai sumbangan AS bagi Komite Aksi Pengganyangan (KAP) Gestapu. Pada dokumen lain disebutkan jumlah itu Rp50 juta.

Bantuan itu memang sejalan dengan kebijakan AS yang membantu Pemerintah Indonesia menghancurkan komunis. Selain itu, menurut sumber yang lain, pihak AS menyerahkan daftar nama pengurus PKI kepada Angkatan Darat melalui staf Adam Malik yang bernama K Adyatman. Menurut hemat saya, informasi ini dapat diterima.

Dampak Tuduhan

Tuduhan Tim Weiner itu memiliki dampak yang sangat besar dalam pengajaran sejarah Indonesia. Adam Malik bukan saja mantan menteri luar negeri dan wakil presiden, tetapi juga seorang pahlawan nasional. Bagaimana mengajarkan kepada para siswa di sekolah bahwa seorang pahlawan nasional yang harus diteladani itu ternyata mata-mata asing.

Soemitro Djojohadikusumo juga dikesankan sebagai agen CIA dalam peristiwa PRRI/Permesta pada 1958 sebagai ditulis oleh George MT Kahin. Tetapi hal ini sudah dibantah secara tertulis dalam biografi Soemitro Djojohadikusumo. Soemitro mengakui pernah berhubungan dengan oranganor CIA, tetapi dia justru dibenci karena tidak mau tunduk.

Yang agak ringan adalah kasus yang menimpa Pater Beek seorang pastur yang membina kader antikomunis pada 1965 di Jakarta. Dia pernah dituduh sebagai agen CIA. Di dalam buku biografi Pater Beek yang baru terbit bulan lalu (Larut tetapi Tidak Hanyut, 2008), persoalan keterlibatan dalam CIA itu tidak disinggung. Tetapi apakah dia memang agen CIA atau bukan, itu tidak memiliki dampak yang besar dalam pengajaran sejarah Indonesia, berbeda dengan kasus Adam Malik yang sudah menjadi pahlawan nasional.

Jalan keluar

Seyogianya pemerintah, misalnya Menteri Sosial, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Adam Malik adalah pahlawan nasional dan tetap demikian. Ketika dia diajukan sebagai pahlawan nasional, Badan Pembina Pahlawan Pusat sudah memeriksa riwayat hidup dan perjuangannya. Dari hasil investigasi tidak ada indikasi bahwa dia bekerja sebagai mata-mata negara lain.

Berkat jasa-jasanya bagi negara dan bangsa dia diangkat sebagai pahlawan nasional tahun 1998. Kalau Tim Weiner memiliki bukti dokumen tertulis tentang keanggotaan CIA Adam Malik coba disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Apakah buku terjemahan Membongkar Kegagalan CIA yang terbit di Indonesia perlu dilarang? Buku itu sendiri sebetulnya menguraikan tentang kegagalan yang dialami oleh dinas rahasia AS yang ternyata tidak sehebat dicitakan selama ini.

CIA mengetahui runtuhnya Tembok Berlin pada 1989 dari layar televisi, bukan dari laporan intelijen mereka. CIA tidak bisa mengantisipasi terjadi peristiwa ambruknya gedung kembar WTC, 11 September 2001. Banyak lagi kekurangan yang dimiliki oleh intelijen negara adidaya tersebut. Memang Tim Weiner telah membaca ribuan dokumen CIA dan mewawancarai banyak orang. Tetapi khusus mengenai Indonesia, dia menulis beberapa kekeliruan.

Misalnya dalam buku ini disebutkan jenderal yang terbunuh dalam peristiwa G30S adalah lima orang, padahal sebetulnya enam orang. Lantas mengenai Adam Malik, tidak ada dokumen tertulis kecuali wawancara tunggal. Buku mengenai CIA cukup berharga untuk dibaca masyarakat Indonesia. Secara umum saya tidak setuju dengan pelarangan buku.

Di sisi lain, jelas tidak bijaksana bila ada informasi keliru itu dibiarkan beredar luas di tengah masyarakat. Saya mengusulkan jalan tengah, yaitu buku tetap boleh beredar, tetapi tiga alinea yang bermasalah itu agar dihitamkan dengan spidol sehingga tidak dapat dibaca. Penghitaman dengan spidol itu juga dilakukan terhadap arsip Departemen Luar Negeri AS yang sudah bisa dibuka, misalnya telah lewat tenggang waktu 25 tahun.

Tetapi ada bagian tertentu dalam arsip itu yang masih belum boleh diketahui publik, itulah yang dihitamkan dengan spidol. Pada buku Tim Weiner ada tiga alinea yang bermasalah yang terdapat pada halaman 330 yaitu paragraf yang menyebutkan 1) Presiden Soekarno melakukan kudeta terhadap pemerintahannya sendiri, 2) Di Jakarta terdapat agen CIA yang memiliki kedudukan strategis, yakni Adam Malik, 3) Clyde McAvoy merekrut dan mengontrol Adam Malik.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargainya pahlawannya. Jelas tidak bijak bila pembunuhan karakter terhadap seorang pahlawan nasional dibiarkan saja. (Koran Sindo)

IV. LAIN-LAIN

:

1. RI proven worthy of UN permanent seat: Envoy

Indonesia's current third term as an elected non-permanent member in the UN Security Council expires at the end of the year. Foreign Minister Hassan Wirayuda has called for comprehensive reforms of the powerful body, citing a need for the representation of the Muslim world and underscoring the fact that the council's veto right has turned out ineffective in many cases. The Jakarta Post's Tony Hotland caught up with Indonesia's Ambassador to UN Marty Natalegawa recently in New York to look back on Indonesia's role in the council. Below are the excerpts.

Question: How has Indonesia performed throughout the current term in the Security Council?

Answer: It had been ten years since we were last in the council. Those ten years were marked by changes in the international community, but more importantly with changes in Indonesia itself. We have been very keen to project, through both the council and our presence there, the changes and continuity in Indonesia's foreign policy. And I think our membership in the council over the last two years has managed to project those changes. How have we been making a difference? I think one of the ways is by building bridges. It is very easy to accentuate differences, all you have to do is simply go on automatic pilot, and end up saying whatever you want with the end result being a divided council, one unable to speak with unification.

I think Indonesia has in a way carved a niche for itself in the council. On many issues we have been the party to whom a lot of countries turn when trying to build bridges, whether it is on the question of Myanmar, or the conflicts in Africa or the Middle East.

For instance on the question of Iran, we cherished and preserved our capacity for independent decision making. We were the only country that stood out among the others. A few months later on the same issue, in September, we stated that the situation could be resolved and we could improve efforts. We engaged and managed to have the Security Council, for the first time to my recollection, place the incentive and dialogue approach on the same level as the sanction-based approach. It was to Indonesia's credit that we brought about, synergized and married the two approaches into one (resolution). We have been trying to make a difference in the limited time we have been in the council. I am not necessarily an impartial observer of this, but I think most would agree that we have made a difference.

Do you think Indonesia made a difference with how we handled Myanmar's security crisis last year?

I think that is another example of Indonesia trying to play a constructive role. We could have simply adopted a very reactive, almost predictable approach in the sense that this was not an issue for the council to deal with. But our position had to be more nuanced than that because of our democratic constituency.

What we did was ensure the UN was part of the solution. To do that, we expressed concerns (about Myanmar) and also gave them some space. In a lot of instances, giving space means less is more.

The work on UN reforms will start next year. What is Indonesia's position on that?

The reform process of the council will begin in February... the inter-governmental process. This has been going on for 15 years, but finally we are going to have proper inter-governmental negotiations in February. We have to prepare for our positions, and the fact that we are leaving the council at that particular time is, speaking from experience, useful.

There are some countries who believe increasing the size of the council must be weighed against the effectiveness of it. Some say if you have a council that is too large, it would become an ineffective and inefficient. But our argument could be that you can have a small, cozy council that could not represent the realities of today's world. Also, its effectiveness would also be compromised because it would not have the authority of representation. Therefore, we are keen to have a council that is representative of today's world. We are realistic there are still wide divisions, we are looking at possibilities of having intermediate solutions... not necessarily having more permanent members but more non-permanent members.

But all in all, it will be a very busy multilateral agenda. First we have to deal with the format, such as what kind of council we want to see. If there was to be an enlargement of the council with more permanent members, again based on its track record, on what we have done, it would not be hard to think of Indonesia serving in the council on a permanent basis. We think for now we should be talking about what kind of reform is going to be undertaken. If we end up having more permanent members, certainly they should not count Indonesia out. Because of the countries that have been mentioned as potential candidates, we would be very pleased to be compared and I think, objectively, we have made a valid argument.

Then there is the question of veto, and whether we should reform it.

Do you think we are leaving behind a better council than we got into?

It is a work in progress. As a member that comes in for two years and then leaves, we are aware of our limitations, of what we can do in a very short two-year period. But in terms of transparency, working methods, making the council more open ... at least these issues are out there. They are being recognized as important. We need to make the process more systematic. That is not by accident, not ad-hoc and not incremental but it becomes the norm. Our turn this time around has put us in a better state to make any future efforts to be in the council again, whether as an elected non-permanent member or, if the reform has taken place, as a permanent one.

What is important is to have some basic parameters, perspectives, and the way I see it Indonesia has those perspectives -- the capacity for independent decision making, a lack of fear for being in a position that differs from that of some powerful countries, and I hope those are the kind of qualities that other members can recognize. We can make our own merit-based decisions.

But one issue that has made our membership more profound than before is now we have strengthened the basis of our foreign policy because of the democratization of our country. Our foreign policy is now formulated through a very coherent and dynamic domestic debate, and where we are, where we stand, and therefore where we can differ, will allow us to agree to disagree. (The Jakarta Post)

V. EDITORIAL :

1. Kemuliaan kepada Guru

Hari Guru diperingati setiap tanggal 25 November. Itulah bentuk penghormatan kolektif terhadap fungsi dan peran guru yang amat mulia. Walaupun dalam praktik harus diakui kemuliaan guru justru telah ditendang ke dasar jurang.

Kita memegang credo bahwa pendidikan adalah tiang utama kemajuan suatu bangsa. Juga credo bahwa pendidikan tanpa guru adalah mustahil. Namun, credo itu dalam praktik dikhianati dengan tahu dan mau.

Menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sesungguhnya membenarkan pengkhianatan itu. Guru sesungguhnya dan sepatutnya adalah pahlawan yang harus diberi tanda jasa berlipat ganda.

Terlalu lama negara memperlakukan guru sebagai pekerja murahan. Sama dengan memperlakukan tentara. Padahal kedua profesi itu adalah vital.

Rendahnya mutu manusia Indonesia yang berakibat pada kekalahan di dalam kompetisi global harus diakui adalah buah dari pengingkaran terhadap pendidikan, khususnya pengkhianatan terhadap guru yang berlangsung sangat lama, bahkan sampai hari ini.

Ketika memperingati Hari Guru, kemarin, masih terlihat para guru bantu yang berdemonstrasi mempertanyakan kejelasan nasib mereka. Mereka--jumlahnya ribuan--tidak diakui sebagai guru, tetapi tetap berfungsi dan dipercaya sebagai pengajar di berbagai sekolah. Guru bukan malaikat. Karena itu, mereka tidak boleh dininabobokan pemuliaan semu melalui sebutan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Sekaranglah saatnya kemuliaan diberikan kepada guru secara lebih jelas, terarah, dan terukur. Salah satu alat ukur pemuliaan dan kemuliaan guru adalah tingkat gaji mereka.

Mulai tahun anggaran 2009, negara dengan bangga memenuhi perintah konstitusi menganggarkan 20% APBN untuk sektor pendidikan. Inilah saat dan momentum meningkatkan kesejahteraan guru. Alokasi anggaran yang demikian besar di sektor pendidikan memperlihatkan perubahan besar dalam orientasi pembangunan. Akan tetapi, terhadap guru tetap saja terjadi disorientasi, terutama dalam perkara kesejahteraan.

Tunjangan fungsional yang telah didengungkan berkali-kali hingga saat ini belum bisa diterapkan secara merata. Sertifikasi dijadikan alasan. Namun, terhadap sertifikasi pun terjadi disorientasi. Sertifikasi yang sesungguhnya pengakuan terhadap kompetensi disederhanakan menjadi kelengkapan dokumen semata.

Ganjalan lain kemuliaan guru adalah pembebanan kepada daerah untuk mengalokasikan APBD sebesar 20% bagi pendidikan. Dengan pembebanan itu, harkat dan martabat guru-guru di daerah atau kabupaten miskin tetap saja tidak termuliakan. Mereka terus dianaktirikan.

Kemuliaan guru juga terabaikan ketika Departemen Pendidikan yang mengelola anggaran menganggap peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari pembangunan sarana dan prasarana fisik. Pembangunan prasarana fisik menjanjikan fee dan komisi, sedangkan menaikkan gaji guru tidak membuka celah bagi kick back. Itulah disorientasi yang menyengsarakan guru.

Krisis pendidikan terlihat juga pada semakin kurangnya tenaga guru. Tidak semata karena distribusi yang timpang, tetapi memang minat menjadi guru lenyap. Mengapa? Karena tidak ada lagi kemuliaan pada profesi yang amat vital ini.

Kemuliaan kepada guru tidak boleh lagi dibatasi pada penghormatan saja. Pemuliaan dan kemuliaan guru ditentukan price, penghargaan melalui harga. Tidak lagi dikelabui penghormatan melalui sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. (Media Indonesia)

Jakarta, 26 November 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu